

**DISTRIBUSI DANA SOSIAL PADA BAITUL MAL
WA TAMWIL (BMT) ALFA DINAR KERJO KARANGANYAR**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

RITWAN THOVA'I
NIM:I000103018
NIRM: 10/X/02.1.2./T/0380

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**DISTRIBUSI DANA SOSIAL PADA BAITUL MAL
WA TAMWIL (BMT) ALFA DINAR KERJO KARANGANYAR**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

RITWAN THOVA'I
I000103018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I



(Dr. Mu'inudinillah Basri, MA)

Dosen Pembimbing II



(Nurul Huda, M.Ag.)

HALAMAN PENGESAHAN

**DISTRIBUSI DANA SOSIAL PADA BAITUL MAL
WA TAMWIL (BMT) ALFA DINAR KERJO KARANGANYAR**

OLEH

RITWAN THOVA'I
I000103018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 20 April 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA



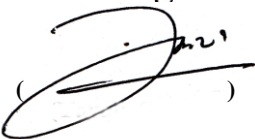
(Ketua Dewan Penguji)

2. Nurul Huda, M.Ag.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Yayuli, S.Ag, MPI.

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan

()

(Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 April 2016

Penulis



RITWAN THOVA'I
I000103018

DISTRIBUSI DANA SOSIAL PADA BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) ALFA DINAR KERJO KARANGANYAR

Oleh :

**Ritwan Thova'i (NIM : I000103018)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
ABSTRAK**

Salah satu peran lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana sosial kepada masyarakat yang berasal dari dana non aset (*denda/ garāmah*) dan sumber lainnya seperti infak, shadaqah, zakat dan wakaf. Dengan demikian maka kewajiban lembaga syariah adalah mendistribusikan dana non aset tersebut sebagai bentuk dana sosial. Hal tersebut sebagaimana penerapan penghimpunan dan pendistribusian dana sosial yang dilakukan oleh (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar yang mengenakan *denda (garāmah)* kepada nasabahnya. Di samping penghimpunan dari *denda (garāmah)*, terdapat beberapa sumber dana sosial lain yang dihimpun oleh BMT Alfa Dinar.

Masalah yang dapat dirumsukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan distribusi dana sosial di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar dan apakah pelaksanaan distribusi dana sosial tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisis penerapan distribusi dana sosial (*garāmah*) di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian diharapkan menjadi stimulasi (perangsang) bagi penelitian selanjutnya dan bisa dijadikan bahan referensi dalam mengelola Lembaga keuangan Islam khususnya pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif di mana dalam menganalisis data yang sudah ada, peneliti menggunakan instrumen analisis penggambaran (deskriptif) dengan mengetahui data yang telah terkumpul dan kemudian menganalisisnya.

Hasil akhir menunjukan dana sosial BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar bersumber dari para nasabah yang lalai dari tanggungjawabnya pada akad murabahah dan lainnya. Dana ini disebut dana *garāmah* karena dengan dana ini diharapkan nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, selain itu dana sosial ini juga bersumber dari dana sukarela masyarakat dalam bentuk iuran wajib anggota maupun sumbangan sukarela. Penerapan distribusi dana sosial oleh BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Denda dapat dikenakan kepada nasabah-nasabah nakal, yang sanggup dan mampu membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja ditunda-tunda. Dana *denda (garāmah)* ini tidak diambil dan dipergunakan oleh BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar melainkan ditampung dalam suatu pos atau rekening yaitu dana sosial yang setiap bulannya akan dilimpahkan atau dihibahkan kepada lembaga amil zakat untuk dipergunakan membantu fakir miskin, anak yatim dan para janda dan jompo.

Kata Kunci: Distirbusi, Dana Sosial, *Garāmah*.

ABSTRACT

One role of Islamic financial institutions is to distribute social funds to the people who come from non-asset funds (fines / *garāmah*) and other sources such as the donation, sadaqah, zakat and waqf. Thus, the obligation to institute sharia is distributing non-asset funds as a form of social funds. Cases where the application of social mobilization and distribution of funds committed by (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar impose fines (*garāmah*) to customer. In addition to the collection of fines (*garāmah*), there are several other sources of social funds collected by BMT Alfa Dinar.

The case can be defined in this research is how the application of the distribution of social funds in the Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar and whether the implementation of the social fund distribution is in accordance with the National Sharia Board Fatwa (DSN) No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000 regarding sanctions for capable customer who Procrastination Payment. The Advantage of this study is to determine and analyze the implementation of the distribution of social funds (*garāmah*) at Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar. Advantage which can be obtained from the study are expected to be stimulated (stimulant) for further research and can be used as reference material in managing Islamic financial institutions particularly at Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar.

This type of research is a field research (field research), this research is descriptive qualitative where in analyzing existing data, researchers used the analytical instrument metaphor (descriptive) by knowing the collected data and then analyze it.

The final results showed social funds BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar sourced from clients were unaware of responsibilities on *murābahah* and others. These funds are called fund of funds *garāmah* because the customer is expected to be more disciplined in carrying out its obligations, in addition to the social fund is also derived voluntary funds from the public in the form of mandatory dues and voluntary donations member. Implementation of the distribution of social funds by BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar accordance with DSN MUI fatwa No. 17 2000 regarding sanctions on capable customer of procrastinating payment. Fine can be imposed on rogue clients, which could dama able to pay on time but deliberately delay. Fund fines (*garāmah*) is not taken and used by BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar but something accommodated in the post or account that social funds each month will be transferred or donated to the amil zakat institutions to be used to help the poor, orphans and widows and decrepit.

Keywords: Distirbution, Social Fund, *garāmah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan non bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Pada prakteknya, saat ini dana-dana non aset menjadi bagian dari dana yang tidak bisa dihindarkan, seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dan dana *garāmah* Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kedua hal tersebut adalah contoh dana non aset yang dikelola baik langsung atau ataupun melalui lembaga sosial sebagai dana potensial dan signifikan untuk memenuhi hajat sosial masyarakat karena jumlah dananya yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana non aset ini misalnya denda dari nasabah yang wanprestasi.

Denda (*garāmah*) dalam kredit ini, adalah sah menurut ulama dan fatwa DSN-MUI dengan mendasarkan kepada kaidah fikih: (تَرُءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ) “*menghindar suatu kemudharatan atau kerusakan hendaknya diutamakan daripada kebajikan atau kemashalahatan.*” Selain itu denda dapat dikenakan kepada nasabah-nasabah nakal, yang sanggup dan mampu membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja ditunda-tunda. Dana ini kemudian tidak diambil dan dipergunakan oleh LKS melainkan ditampung dalam satu pos atau rekening yaitu dana non aset atau dana sosial yang setiap bulannya akan dilimpahkan atau dihibahkan kepada lembaga sosial. Berdasarkan peraturan ini, maka kewajiban bank syariah adalah mendistribusikan dana non aset tersebut sebagai bentuk dana sosial. Namun dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Hal tersebut sebagaimana penerapan penghimpunan dan pendistribusian dana sosial yang dilakukan oleh (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar yang mengenakan denda (*garāmah*) kepada nasabahnya. Di samping penghimpunan dari denda (*garāmah*), terdapat beberapa sumber dana sosial lain yang dihimpun oleh BMT Alfa Dinar. BMT ini sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai lembaga intermediasor yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Untuk itulah perlu dikaji tentang penerapan distribusi dana *garāmah* tersebut dan kesesuai dengan hukum Islam pada BMT tersebut

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumsukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan distribusi dana sosial di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar dan apakah pelaksanaan distribusi dana sosial pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui serta menganalisis penerapan distribusi dana sosial (*garāmah*) di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan menganalisis apakah distribusi dana sosial

yang dilakukan oleh Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: *pertama*, manfaaf secara teoritis; Penelitian ini dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi stimulasi (perangsang) bagi penelitian selanjutnya. *Kedua*, secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan bahan referensi dalam mengelola Lembaga keuangan Islam khususnya pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar secara profesional sekaligus sebagai khazanah keilmuan dan keislaman terutama dalam bidang muamalah, bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan sebagai rujukan dalam pembahasan selanjutnya yaitu: Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Syamsuri Dwi Fitrianto, yang membahas bagaimanakah fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan bagaimana metode istimbath DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ditinjau menurut hukum Islam.

Dari beberapa penelaahan penulis terhadap penelitian yang sejalan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa terdapat sebagian penelitian yang telah membahas tentang dana non aset menurut fatwa MUI. Fokus dalam penelitian ini adalah pada penerapan atau distribusi dana non aset (pinalti) dalam perbankan syariah dan kesesuaiannya dengan hukum Islam di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Dana Sosial

Dana sosial secara sederhana adalah dana atau uang yg disediakan untuk suatu keperluan sosial. Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas. Hasil dari pemungutan dana tersebut kemudian dijadikan sebagai dana non aset atau dalam BMT Alfa Dinar disebut dana *garāmah* atas denda keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran.

Selain sumber di atas, terdapat sumber lainnya misalnya pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dari nasabah. Hasil semua pengumpulan dana tersebut kemudian dikumpulkan kemudian

2. Dana Sosial dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam khusus yang mengatur bidang muamalah mengenai dana sosial yang bersumber dari *garāmah*, jika seseorang dinyatakan lalai dari tanggung jawabnya maka akan dikenakan ganti rugi. Hasil denda atau ganti rugi inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai dana

sosial sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

3. Sumber-sumber Dana Sosial

Bank syariah dapat berjalan dengan modal yang bersumber dari dua komposisi modal yaitu *core capital* dan kuasi ekuitas. Pada dasarnya sumber dana bank syariah terdiri dari:

- a. Modal yang diserahkan oleh *owner* pada akhir periode tahun buku. Penggunaan modal ditempatkan pada aktivitas yang produktif melalui penyaluran pada pembiayaan.
- b. Penitipan atau pengiriman yang dilakukan bank syariah sebagai salah satu cara mengalirkan dan menggerakkan dana.
- c. Investasi yang digunakan dalam akad *muḍārabah*
 - a. Memelihara dana masyarakat dengan menerapkan kebijakan etis dalam pengelolaan lembaga ekonomi.
 - b. Memenuhi pembiayaan masyarakat.

Berkaitan dengan dana sosial bank syariah secara umum, sumber-sumber dana sosial dalam perbankan dapat dikenakan kepada ketentuan berikut:

Klausul dalam kontrak jika nasabah tidak memenuhi akad kontrak yang telah disepakati.

- a. Perjanjian kredit macet dan
- b. Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karena melakukan penarikan pada akunsimpanan sebelum waktunya, kelambatan pembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak (*penalty requirements*).

4. Distribusi Dana Sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah

Peranan bank syariah menurut Ascarya & Yumanita, memiliki dua peran utama, diantaranya sebagai badan sosial dan badan usaha. Sebagai badan sosial, bank syariah memiliki fungsi mengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan *ṣadaqah* (ZIS), serta penyaluran pinjaman kebajikan.

Menurut Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) ada beberapa fungsi dalam bank. Tahun 2004, bahwa untuk wakaf khususnya wakaf tunai (uang) diserahkan sepenuhnya kepada pengelola zakat. Pengelola zakat yang diberi wewenang untuk mengelola adalah lembaga keuangansyariah yang ditunjuk oleh menteri. Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, dilihat dari tempat penelitiannya jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana sumber data didapatkan langsung dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan karakteristik suatu data.

B. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran data-data terkait lapangan yang berkaitan dengan identitas BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar, serta dokumen yang berkaitan dengan penerapan distribusi dana sosial yang telah dilakukan oleh BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar.

C. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan yang melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak menurut peraturan Hukum dan norma yang berlaku berdasarkan ketentuan yang ada dalam syariat Islam khususnya mengenai masalah keuangan Islam.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana dalam menganalisis data yang sudah ada, peneliti menggunakan instrumen analisis penggambaran (deskriptif) dengan mengetahui data yang telah terkumpul dan kemudian menganalisisnya

DESKRIPSI DATA

A. Baitul Maal Wa Tamwil Alfa Dinar Karanganyar

Baitul Maal Wa Tamwil Alfa Dinar Karanganyar semula bernama KJKS BMT Alfa Dinar didirikan pada Tanggal 1 Juni 2003 oleh aktivis masjid dan pegiat ekonomi Islam di kabupaten Karanganyar. Diresmikan tanggal 9 Juni 2003 oleh pengurus dan pengelola Alfa Dinar dan pejabat kelurahan Bejen Karanganyar, sampai akhir Juni 2003 terkumpul dana Rp 250.000.000,-. Pada tanggal 28 Januari 2012 diadakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar, yang mana wilayah kerja KJKS BMT Alfa Dinar dari wilayah kerja Propinsi Jawa Tengah ditingkatkan menjadi wilayah kerja Nasional (Wilayah Republik Indonesia). Keputusan ini dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar KJKS BMT Alfa Dinar No. 21 Tanggal 19 Maret 2012 di Notaris & PPAT Budi Yojantiningrum, SH. Serta telah dilaporkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM RI dan dicatat dalam buku yang telah disediakan untuk itu nomor : 56/Lap-PAD/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

1. Badan Hukum

a. Akte Pendirian: No. 444/BH/28.5-1/VII/2003 Tanggal 22 Juli 2003

b. Akte Perubahan Badan Hukum :

- (1) Akte Perubahan No. 01/BH/PAD/KDK.II/I/2004 tanggal 19 Januari 2004, Perubahan Badan Hukum dari Koperasi Serba Usaha Syariah Alfa Dinar (KSU Syariah Alfa Dinar) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Alfa Dinar (KSP Syariah Alfa Dinar).

- (2) Akte Perubahan No. 12/PAD/KDK.11/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, Perubahan Badan Hukum dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah Alfa Dinar (KSP Syariah Alfa Dinar) menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Alfa Dinar (KJKS BMT Alfa Dinar).
- (3) Akte Notaris & PPAT Budi Yojantiningrum, SH No. 21 Tanggal 19 Maret 2012, Perubahan Anggaran Dasar (PAD) KJKS BMT Alfa Dinar dari wilayah Jawa Tengah menjadi Wilayah Republik Indonesia (Nasional). Laporan sudah dicatat di Kementerian Koperasi dan UKM RI No. 56/Lap/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

2. Perijinan, TDP, SIUP dan NPWP

- a. Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah No. 56/SISPK/KDK.11/VII/2010
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi No. 113426400310 yang berlaku sampai dengan 1 September 2018
- c. SIUP No. 503/646/11.34/SIUP-PK/IX/2008
- d. NPWP No. 02.305.006.5-528.000

3. Visi dan Misi, Budaya Kerja dan Nilai Dasar

- a. Visi dan Misi
Adapun visi lembaga ini adalah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Yang Sehat Melalui Layanan Terbaik Serta Terdepan Dalam Inovasi Produk Oleh SDI Profesional Dan Diridhoi Allah SWT. Sedangkan untuk Misi yang ingin dibentuk adalah: Mengedepankan akhlakul karimah, mengutamakan kejujuran dan kedisiplinan, menciptakan produk-produk berkualitas, menjalin kemitraan jangka panjang, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
- b. Budaya Kerja (*corporate culture*)
Senantiasa Mengutamakan Kerja Ikhlas, Kerja Keras Kerja Cerdas, Serta Kerja Tuntas
- c. Nilai Dasar (*corporate value*)
 - (1) Dakwah tugas kami
 - (2) Ibadah kepada Allah tujuan kami
 - (3) Niat ihlas landasan kerja kami
 - (4) Ahsanu Amala cita-cita kami
 - (5) Rahmatan Lil Alamien semboyan kami

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS) BMT Alfa Dinar.

- a. Dewan Pengurus

(1) Ketua Pengurus	: H. Suyoto, S.Pd
(2) Sekretaris	: Bambang Haryanto, SE
(3) Bendahara	: Supri Hartono, SE
- b. Dewan Pengawas Syari'ah

(1) Ketua	: Drs. H. Jularso
(2) Anggota	: Drs. H. Muh. Khoyin, MA

- (3) Anggota : DR. H. Dindin Sholahudin, MA
- c. Manajemen
 - (1) Administrasi Keuangan : Suyatmi, SE
 - (2) IT dan Otorita : Tri Joko Wahyono, S.Kom
- d. Manager Baitul Maal : Ardiyansyah Rosyad, S.ThI
- e. Manager Baitut Tamwil : Bambang Haryanto, SE
- f. Kepala Kantor Cabang Kerjo: Sunarno

B. Sistem Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Sosial

Semua produk pembiayaan BMT Alfa Dinar menerapkan akad *muḍārabah*, *musyārahah* ataupun *murābahah*. Di mana dengan akad-akad tersebut dipandang sesuai dengan prinsip syariah karena dalam akad ini akan diperoleh keadilan baik bagi pihak BMT maupun pihak anggota peminjam dana. Hal inilah yang menjadi alasan dalam pemilihan akad pada produk-produk simpanan dan pembiayaan di BMT Alfa Dinar Karanganyar. Penghimpunan dana dari nasabah sebagai bentuk *garāmah* bagi pihak yang wanprestasi adalah berdasarkan pada kesepakatan antara anggota dengan BMT pihak nasabah. Kesepakatan dalam menentukan berapa besar dana *garāmah* inilah yang akan dikenakan kepada anggota yang mengambil simpanan *muḍārabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo. Yang mana besar kecilnya penalti tergantung pada besar kecilnya simpanan dan lamanya jangka waktu yang dipilih anggota. Begitu juga dengan *musyārahah* ataupun dan *muḍārabah*. Bagi yang wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana jatah tempo yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan dana *garāmah*. Khusus murabahah ini, denda dari nasabah mengacu pada hasil wawancara kepada (Kepal Cabang BMT Afadinar Kerjo Karanganyar Bapak Sunarno):

“Sistem penghimpunan dana pada BMT Alfa Dinar pada umumnya menggunakan pendekatan musyawarah. Artinya segala yang berkaitan dengan perihal transaksi kamu rembuk terlebih dahulu, meskipun dalam pelaksanaanya *murābahah* sendiri mengacu kepada ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.”

Setelah dilakukan penghimpunan, langkah selanjut adalah pendistribusian. Dana-dana ini kemudian dimasukan dalam rekening khusus untuk didistribusikan dalam bentuk zakat, infak, dan *sadaqah* atau sumbangan lainnya yang berkaitan dengan dana sosial. Selain didistribusikan ke dalam bentuk zakat, infak dan di atas, hal ini berkaitan juga dengan sumber dana sosial. Secara umum, menurut Bapak Sunarno (Direktur BMT Alfa Dinar):

“Dana sosial ini selain dari anggota nasabah yang wanprestasi di mana sebelumnya telah diberikan somasi (teguran), dana sosial di BMT Alfa Dinar diambil dari dana zakat, infak dan *sadaqah* dari relawan dan pengusaha-pengusaha seperti penjual barnag di ruko-ruko dan sebagainya. Kemudian, dana ini didistribusikan kepada masyarakat melalui BAZNAS, LAZNAS, fakir miskin dan janda-janda tua, jompo, anak yatim. Itupun dipilih dari lingkungan binaan sekitar karanganyar setelah dilakukan survei.”

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat mengklarifikasikan bahwa pendistribusian dana sosila oleh BMT Alfa Dinar terbagi menjadi dua macam:

1. Melalui lembaga formal secara langsung yaitu BAZNAS dan LAZNAS atau badan zakat nasional yang dibentuk oleh negara.

2. Pendistribusian dana sosial secara langsung oleh pihak BMT Alfa Dinar kepada yang berhak menerimanya. Seperti fakir miskin, jompo dan lainnya yang berlokasi pada pembinaan daerah BMT Alfa Dinar yakni seputar Karanganyar.

Sedangkan bentuk penyaluran dana sosial di BMT Alfa Dinar mengacu kepada hasil wawancara dari Bapak Sunarno yakni:

“Kepada fakir miskin dengan memberikan santunan setiap bulannya minimal 100.000,- (seratus ribu) dan kepada para jompo dan janda-janda tua berupa beras perbulannya 10 (sepuluh) Kilo yang diberikan secara berkala. Sedangkan untuk lembaga formal seperti LAZNAS dan BAZNAS melalui transaksi khusus yang berkaitan dengan ketentuan yang sudah ada di undang-undang”

Berdasarkan wawancara di atas, sistem penghimpunan dan penyaluran dana sosial

ANALISIS DATA

Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana penerapan distribusi dana sosial di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar dan analisis tentang pelaksanaan distribusi dana sosial yang dilakukan oleh Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

A. Sistem Penghimpunan Dana Sosial

Sebagai badan sosial, BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar memiliki fungsi mengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan *sadaqah* (ZIS), serta penyaluran pinjaman kebajikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sunarno (Ketua Cabang BMT Alfa Dinar Kerjo) bahwa sistem penghimpunan dana sosial dilakukan berupa penghimpunan dari nasabah yang telah melakukan wanprestasi (lalai dari jangka waktu pembayaran yang telah tentukan), serta penghimpunan secara langsung dari masyarakat yang mempunyai jiwa dermawan yang menyisihkan sebagian harta mereka bagi orang-orang yang tidak mampu

B. Sistem Pendistribusian Dana Sosial

Sebagaimana yang dijelaskan, bahwa sistem pendistribusian dana sosial diberikan secara langsung kepada yang berhak menerimanya atau kepada individu yang mereka percayakan. Distribusi dilakukan dengan pendekatan personal di mana seseorang yang layak menerima dana tersebut.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang penerapan distribusi dana sosial pada BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar adalah:

1. Dana sosial BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar bersumber dari para nasabah yang lalai dari tanggungjawabnya sebagai mitra bisnis baik pada akad murabahah dan lainnya. Dana ini disebut dana *garāmah* karena dengan dana ini diharapkan nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, selain itu dana sosial ini juga bersumber dari dana filantropi atau dana sukarela dari masyarakat dalam bentuk iuran wajib anggota maupun sumbangan sukarela, pengusaha-pengusaha dan dari ruko-ruko yang sudah disediakan tempat infaknya

oleh pihak BMT. Pendistribusian dana sosial ini kemudian ditampung dalam satu rekening khusus untuk kemudian disalurkan kepada sosial melalui lembaga zakat serta diberikan secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerimanya dari fakir miskin dan anak yatim secara berkala.

2. Penerapan distribusi dana sosial oleh BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Denda dapat dikenakan kepada nasabah-nasabah nakal, yang sanggup dama mampu membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja ditunda-tunda. Dana denda (*garāmah*) ini tidak diambil dan dipergunakan oleh BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar melainkan ditampung dalam satu pos atau rekening yaitu dana sosial yang setiap bulannya akan dilimpahkan atau dihibahkan kepada lembaga amil zakat untuk dipergunakan membantu fakir miskin, anak yatim dan para janda dan jompo. Dengan ini, jika telah benar-benar dilaksanakan oleh BMT Alfa Dinar, dapat disimpulkan bahwa LKS tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT Alfa Dinar dalam penghimpunan dan pendistribusian dana sosial agar lebih dapat disosialisasikan agar pola pikir masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar tidak dianggap oleh masyarakat sama dengan koperasi atau bank konvensional pada umumnya.
2. Hendaknya fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini menjadi bahan evaluasi dalam rangka menggiatkan kembali perekonomian Islam yang betul-betul murni syari'i agar terhidar dari praktik keuangan syariah yang dianggap bercampur dengan keuangan konvensional. Adanya fatwa tentang konsep *murābahah* syari'ah ini hendaknya bisa diaplikasikan dalam keuangan syariah. Kemudian DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran agar diaplikasikan sebenar-benarnya dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang perbedaan prinsip perbankan syariah dan konvensional secara riil. Karena kesesuaian antara penerapan distribusi dana sosial oleh BMT Alfa Dinar dengan fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, tidak berhenti hanya pada tahapan teori, namun perlu diaplikasikan semaksimal mungkin. Terutama masalah pendistribusannya diarahkan kepada kegiatan ekonomi kreatif dalam bentuk usaha-usaha dibidang perdagangan, jasa dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Neneng. 2010. *Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang pada Kartu Kredit Syari'ah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI (Studi Analisis Fatwa DSN No 54/DSN-MUI/X/2006)*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Ascarya & Yumanita. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offest.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. Lihat DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran
- Fitrianto, Syamsuri Dwi. 2002. *Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusyamsi, Imam. 1999. *Asset Liability Management (Strategi, Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sholahudin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammad University Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taslimah, Heni. 2008. *Tinjaun Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tatang, M. Amirin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indoneisa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Undang-undang Republik indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Wahidah, Lihatul. 2011. "Studi Tentang Implementasi Fatwa DSNMUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di BMT Fajar Mulia Ungaran", skripsi (tidak di terbitkan). IAIN Walisongo Semarang.
- Winarno, Sigit dkk. 2006. *Kamus Lembaga Keuangan*. Bandung: CV Pustaka Grafika.